## Diseminasi BIG dan Komisi VII DPR RI di Randudongkal

Penyerahan Peta NKRI ke Masyarakat

Pada tanggal 13 Agustus 2018, Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas (PPTRA) BIG melakukan Diseminasi Informasi Geospasial (IG) di Desa Randudongkal, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang. Diseminasi dilakukan dengan mengusung tema "Mengenal dan Mencintai NKRI melalui Atlas". Forum ini dihadiri oleh anggota Komisi VII DPR RI, Ramson Siagian, tokoh masyarakat dan aparat pemerintah Randudongkal, anggota PKK, serta tenaga ahli dari Komisi VII yang memiliki ruang lingkup pekerjaan dalam bidang energi, riset dan teknologi, serta lingkungan hidup.

Acara diseminasi dibuka oleh Kepala Biro Perencanaan, Kepegawaian dan Hukum BIG, F Wahyutomo dan Kepala Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas, Mulyanto Darmawan. Dalam sambutannya, disampaikan manfaat IG antara lain untuk meningkatkan pengambilan keputusan atau kebijakan yang tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan. Lebih lanjut, IG dapat dikombinasikan dengan informasi sosial ekonomi sehingga menghasilkan informasi baru terkait penanganan masalah yang terjadi di masyarakat. Sesi berikutnya oleh Supriati selaku perwakilan masyarakat Randudongkal menyampaikan terima kasih kepada BIG. Beliau menyampaikan keunggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Pemalang dan berharap agar BIG dapat memberikan wawasan mengenai IG serta kemungkinan pemanfaatannya untuk masyarakat Randudongkal dan sekitarnya. Anggota DPR RI, Ramson Siagian yang lebih familiar dipanggil Bung Ramson menyampaikan bahwa kegiatan diseminasi IG ini merupakan bentuk kerjasama antara legislatif dan eksekutif sebagai salah satu sarana mensosialisasikan produk IG yang dapat digunakan oleh masyarakat.

Puncak acara berupa pemaparan mengenai potensi NKRI dan Pemalang oleh Randhi Atiqi. Indonesia sebagai negara kesatuan memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada dan luas wilayah daratan NKRI lebih besar dari gabungan luas negara-negara maju di Eropa. Potensi tersebut perlu dikelola untuk kesejahteraan masyarakat. Dari aspek lokal, Kabupaten Pemalang memiliki luas wilayah 1.100 km² dan jumlah penduduk 1,5 Juta jiwa yang setara dengan jumlah penduduk negara Bahrain. Negara di Teluk Persia ini memiliki luas wilayah lebih sempit daripada Pemalang namun sangat maju dan berkembang. Hal ini menunjukan Kabupaten Pemalang masih memiliki potensi wilayah yang dapat digali lebih optimal, salah satunya dengan memanfaatkan data IG. Kegiatan diseminasi diharapkan menjadi sarana bagi BIG untuk dapat menyampaikan pentingnya mengenal wilayah NKRI sehingga masyarakat tahu potensi wilayahnya. **[Dinar Farahiyah R, 2018]**

## PROGRES ASISTENSI & SUPERVISI PETA TATA RUANG

| Asistensi Peta RTR | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | July | Agust | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTRW Nasional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KS Nasional | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| RTRW Provinsi | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 16 |
| KS Provinsi | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 13 |
| RTRW Kabupaten/Kota | 16 | 25 | 63 | 60 | 74 | 45 | 78 | 59 | 420 |
| KS Kabupaten/Kota | 1 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 23 |
| RDTR | 50 | 144 | 162 | 80 | 120 | 95 | 116 | 93 | 860 |
| Jumlah | 73 | 182 | 236 | 145 | 202 | 142 | 204 | 157 | 1341 |

Asistensi & Supervisi Peta RTR Periode Januari - Agustus 2018

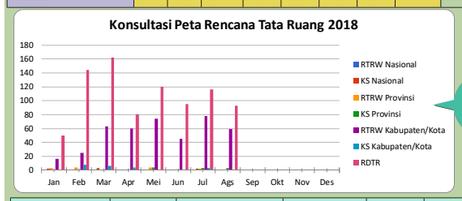


Grafik Asistensi & Supervisi

| Wilayah | RDTR | RTRW Kab/Kota | RTRW Prov | KSN | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Gorontalo | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| DIY | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jawa Barat | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| Jawa Timur | 17 | 3 | 0 | 0 | 20 |
| NTT | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Jawa Tengah | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| Sulawesi Barat | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Sulawesi Selatan | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Sulawesi Tenggara | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bali | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Banten | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sumatera Barat | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Kalimantan | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Bangka Belitung | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Papua | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Total | | | | | 63 |

63 Rekomendasi

Total Rekomendasi Periode Jan-Agust 2018

## *The Largest* Poco-Poco *Guinness World Records* 2018

ASIAN GAMES 2018 | Jakarta Palembang

BIG ikut mendukung Asian Games 2018 dengan mengirimkan perwakilan untuk mengikuti Pemecahan Rekor Dunia bertajuk " *The largest Poco Poco Dance*" yang diikuti 65.000 peserta dari kalangan pelajar, mahasiswa, TNI/POLRI, DWP, K/L, dan masyarakat umum.

Pemecahan rekor ini diselenggarakan pada tanggal 5 Agustus 2018 di sepanjang jalan protokol dari Istana Negara hingga Gelora Bung Karno. Kegiatan ini merupakan acara spektakuler untuk menyambut Asian Games 2018 sekaligus melestarikan budaya bangsa dan mengangkat nama Indonesia di pentas dunia . [Wahyu Tri H, 2018]

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

**Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi :**

PUSAT PEMETAAN TATA RUANG DAN ATLAS
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
Gedung F Lantai 2
Jl. Raya Jakarta-Bogor Km 46, Cibinong, Bogor

Telp - PPTRA : (021) 8764613
Fax - PPTRA : (021) 8764613
Email : redaksi.ptra@gmail.com
Twitter: @pptra_big
Instagram : @pptra_big
http://big.go.id/newsletter/

EDISI AGUSTUS 2018

# TATA RUANG & ATLAS NEWSLETTER

MEDIA INFORMASI PEMETAAN TATA RUANG, DINAMIKA SUMBERDAYA, DAN ATLAS

## CATATAN BERANDA

Subhanallah, penerbitan Newsletter edisi bulan Agustus ini terasa punya nilai tersendiri. Berbagai peristiwa penting terjadi tanah air di bulan Agustus dan dirayakan seluruh rakyat Indonesia. Sebut saja peringatan Kemerdekaan 17 Agustus, Asian Games, Hari Raya Idul Qurban 1439 H, dan bulan haji. Selain semarak berbagai perayaan, bulan Agustus juga ditandai dengan peristiwa gempa bumi yang mengguncang wilayah Lombok, Nusa Tenggara Barat yang menyebabkan lebih dari 500 orang meninggal dunia, ratusan orang luka-luka dan ribuan mengungsi kehilangan rumah tinggal. Oleh karena itu, mewakili unsur staf dan pimpinan di PPTRA serta redaksi Newsletter kami menyampaikan rasa duka dan bela sungkawa atas musibah bencana di NTB. Semoga masyarakat NTB bisa tabah dan kuat menghadapai semua dan proses rehabilitasi serta rekonstruksi berjalan lancar.

Semarak perayaan dibulan Agustus ternyata tidak semarak kegiatan, terlihat dari angka penyerapan anggaran di PPTRA yang hanya naik 1% dari bulan sebelumnya. Alasan paling utama adalah adanya kelambatan dalam proses lelang dan penerapan sistem dan peraturan baru yang kurang diantisipasi dengan cepat oleh tim IT yang ada. Akibatnya beberapa kontrak yang gagal tidak dapat lagi dilakukan pengulangan karena masalah waktu. Belum lagi adanya sisa kontrak yang tidak bisa digunakan karena terkait aturan bahwa sisa anggaran kontrak kegiatan prioritas nasional (PN) hanya boleh digunakan untuk mendukung kegiatan PN, itupun memerlukan revisi DIPA dan pertemuan *trilateral meeting* dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan.

Namun demikian apapun keadaannya, kita tetap mensyukuri nikmat Allah SWT apapun pemberiannya. Memang sejak awal sudah harus diantisipasi akan adanya kelambatan dalam penyelenggaraan kegiatan. Ibarat organisasi bila tanpa inovasi maka akan mati. Demikian pula inovasi dalam kegiatan pemetaan tata ruang dan atlas, kegiatan percepatan penyelesaian peta tata ruang tetap dikejar tahun ini ditargetkan sekitar sedikitnya 200 peta tata ruang akan dikeluarkan rekomendasinya oleh BIG. Demikian pula proses bantuan dan bimbingan teknis. Kegiatan lain yang sudah berjalan seperti survei bentang lahan gunung berapi dan dinamika spasial. Kami tetap optimis mentargetkan akhir anggaran penyerapan akan mencapai 90%. Akhirnya kami ucapkan selamat menikmati perayaan dan selamat membaca. **[Mulyanto Darmawan, 2018]**

KERJA KITA PRESTASI BANGSA

## Isu Strategis & Info Kebijakan

Dalam Undang-undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan bahwa Pemerintah harus menyebarluaskan informasi yang terkait rencana umum dan rencana rinci tata ruang, arahan peraturan zonasi, serta pedoman bidang penataan ruang. Dengan amanat itu maka seluruh peraturan pemerintah, peraturan presiden, serta peraturan daerah terkait rencana tata ruang harus disebarluaskan termasuk petanya sebagai bagian tidak terpisahkan dari sebuah peraturan.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah No 15 tahun 2010, pasal 15 disebutkan bahwa perlu dibuat suatu pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang yang mutakhir, efisien dan terpadu. Pengembangan sistem informasi tersebut dilaksanakan melalui penyediaan basis data dan informasi bidang penataan ruang dengan mengembangkan jaringan elektronik. Tujuan dari pengembangan sistem informasi ini adalah agar masyarakat dapat mengakses dan menjangkau dengan mudah. Untuk mewujudkannya, terutama pada aspek perpetaannya, saat ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) telah mengembangkan *www.gistaru.atrbpn.go.id* yaitu berupa portal yang mempublikasikan peta-peta rencana tata ruang dalam format GIS berbasis Web. Melalui portal ini, maka peta-peta rencana tata ruang yang telah melalui tahapan asistensi teknis perpetaan di BIG, serta tahapan substansinya telah selesai di Kementerian ATR, dapat ditampilkan pada portal tersebut. Rencana tata ruang yang ditampilkan pada portal tersebut hanya yang sudah disahkan.

Masyarakat dapat mengakses peta rencana tata ruang dari berbagai tingkatan, mulai dari rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau, rencana tata ruang kawasan strategis nasional sampai dengan rencana tata ruang provinsi, kabupaten dan kota. Pengembangan ke depan, portal ini juga dapat menampilkan peta-peta RDTR berskala besar. Masyarakat juga dapat membandingkan arahan rencana tata ruang tersebut antar tingkatan dengan melakukan *overlay* peta-petanya.

Sebagai catatan bahwa peta-peta rencana tata ruang ini tampil dalam sistem tersebut merupakan usaha panjang BIG untuk mewujudkan satu sistem perpetaan di Indonesia melalui kebijakan satu peta. Kegiatan asistensi peta-peta rencana tata ruang di PPTRA berkontribusi besar dalam terwujudnya hal tersebut. Terwujudnya sistem informasi geografis peta rencana tata ruang berbasis web ini maka amanat pasal 13 UU No 26 tahun 2007, yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh informasi penataan ruang, telah dilaksanakan.

**[Ryan Pribadi, 2018]**

*www.gistaru.atrbpn.go.id*

**REDAKSI:**
| **Penanggung Jawab :** Kepala Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas | **Tim Redaksi:** Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas |
| **Editor:** Mulyanto Darmawan, Fakhruddin Mustofa , Sri Eka Wati, Roswidyatmoko D., Randhi Atiqi, Chintia Dewi |
| **Desain Tata Letak:** Ika Rosalika |

POTRET KEGIATAN

## FGD PEMETAAN SOSIAL UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019, pemerintah bertekad mengejar target untuk menurunkan persentase kemiskinan pada kisaran 7-8%. Program-program pemerintah yang telah dijalankan selama ini perlahan-lahan telah berhasil menurunkan angka kemiskinan menjadi 9,82 (data BPS Maret 2018). Misi pemerintah perlu didukung semua pihak sebab masalah kemiskinan di Indonesia cukup kompleks. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti tingginya tingkat pengangguran, tingginya populasi penduduk miskin di pedesaan, ketimpang luas wilayah dengan aksesibilitas, tingginya tingkat urbanisasi, serta kurangnya kesempatan kerja karena kualitas sumberdaya manusia. Oleh sebab itu, dukungan program penanggulangan kemiskinan perlu digalakkan, salah satunya adalah pendataan kemiskinan yang akurat berbasis geospasial.

Suasana FGD

Terkait penanggulangan kemiskinan, Badan Informasi Geospasial turut serta aktif didalamnya, khususnya dalam hal pemetaan sosial yang berbasis wilayah. Untuk itulah pada tanggal 15 Agustus 2018 di Hotel Aston Pasteur Bandung, Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas (PPTRA) mengadakan FGD Pemetaan Sosial untuk Mendukung Program Penanggulangan Kemiskinan. FGD diikuti oleh Bappeda dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dan perwakilan Bappeda serta Dinas Sosial 9 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Acara yang dibuka oleh Kepala PPTRA, Mulyanto Darmawan. Ini menjadi ajang pertukaran informasi mengenai pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan di wilayah masing-masing.

Pemetaan sosial ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengetahui variasi tingkat kesejahteraan penduduk antar wilayah, mengetahui potensi sumberdaya alam suatu wilayah yang diintegrasikan dengan tingkat sosial ekonomi masyarakat, serta diharapkan berfungsi sebagai informasi geospasial tematik untuk evaluasi program dan kebijakan terkait penanggulangan kemiskinan. Nurwadjedi, selaku Deputi Bidang IGT memberikan arahan dan kebijakan IGT dalam mendukung program penanggulangan kemiskinan. Beliau mengapresiasi penuh terhadap seluruh organisasi perangkat daerah Provinsi Jawa Barat yang menginformasikan penanggulangan kemiskinan di daerah. Dukungan pemetaan sosial berbasis kewilayahan/spasial diharapkan dapat mendukung program penanggulangan kemiskinan yang merupakan salah satu kegiatan prioritas nasional dan SDGs. **[Adinda Cempaka, 2018]**

## RAPAT PLENO PETA RTRW KABUPATEN MAMUJU

Pada hari Jumat, 20 Juli 2018, Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas, BIG kembali mengeluarkan surat rekomendasi untuk perpetaan yaitu Peta RTRW Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Rekomendasi RTRW ini merupakan rekomendasi ke tiga belas yang dikeluarkan oleh PPTRA pada tahun 2018. Kabar ini merupakan kemajuan yang cukup signifikan, selaras dengan visi dan misi percepatan penyelesaian tata ruang.

Rapat pleno dibuka secara langsung oleh Kepala Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas, Mulyanto Darmawan dan dihadiri oleh Kepala Bappeda kabupaten Mamuju Muh. Syahril, beserta tim. Dalam sambutannya Kepala Pusat PTRA menjelaskan terkait pentingnya peta dalam penyusunan Perda RTRW. Perda dan peta ini menjadi sebagai kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Lebih lanjut, Mulyanto Darmawan melakukan uji petik secara menyeluruh dari sumber data hingga album peta. Sebelum dilakukan uji petik, tim teknis yang selama ini mengawal asistensi dan supervisi RTRW Mamuju, Chintia Dewi, menyampaikan progres Peta RTRW Kabupaten Mamuju secara terperinci.

Sebagai pusat ibukota Provinsi Sulawesi Barat, RTRW Kabupaten Mamuju ini menjadi produk Perda yang sangat ditunggu karena banyaknya rencana pembangunan dan investasi yang akan dilakukan disana. Meskipun demikian, Perda sempat tersendat karena dampak pemekaran sebagian wilayah Mamuju menjadi Kabupaten Mamuju Tengah. Dalam waktu dekat juga akan dilakukan pemekaran kembali dengan pembentukan Kota Mamuju.

Pada proses uji petik, Mulyanto Darmawan menyampaikan beberapa pertanyaan serta masukan, salah satunya adalah terkait peningkatan infrastruktur khususnya di wilayah yang mengarah ke pegunungan atau dibagian timur. Hal ini terkait pembangunan yang masih difokuskan di kawasan pesisir yang merupakan pusat permukiman. Harapannya, rekomendasi peta RTRW menjadi acuan pembangunan selama 20 tahun ke depan dan mampu mengakomodir pembangunan secara terintegrasi dan menyeluruh yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan. **[Chintia Dewi, 2018]**

Foto Bersama

## TIM ATLAS LAKSANAKAN SURVEI DI DAERAH SEKITAR GUNUNG API TIPE A PROVINSI JAWA TIMUR

Awal bulan ini, PPTRA kembali menerjunkan tim survei ke Provinsi Jawa Timur. Kali ini, survei ditujukan untuk mengumpulkan data sumber daya lahan di daerah sekitar Gunung Api tipe A. Tim survei yang diberangkatkan adalah gabungan personil teknis internal PPTRA dan beberapa orang pakar Geografi, Sumber Daya Lahan, dan Ilmu Tanah dari Universitas Gadjah Mada. Dengan kekuatan 16 orang personil, tim survei dibagi menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama melaksanakan survei di daerah sekitar Gunung Ijen – Raung, kelompok kedua di daerah sekitar Gunung Kelud – Arjuna – Welirang, dan kelompok ketiga di daerah sekitar Gunung Bromo – Tengger – Semeru – dan Gunung Lamongan.

Salah seorang anggota tim survei, Prof. Dr. Junun Sartohadi, menuturkan bahwa Atlas Bentang Sumber Daya Lahan Gunung Api yang tengah disusun ini adalah sebuah terobosan untuk memberikan perspektif baru kepada masyarakat dalam memandang gunung api. "Di Indonesia terdapat 127 gunung api aktif yang terdiri dari 77 gunung api tipe A, 29 gunung api tipe B, dan 21 gunung api tipe C", ucapnya saat melaksanakan survei di daerah sekitar Gunung Kelud. Beliau mengatakan, keberadaan gunung api tersebut bukan merupakan sumber bahaya semata, akan tetapi telah lama mendatangkan manfaat positif bagi masyarakat di sekitar gunung api. Junun menambahkan, lahan pertanian yang subur, ketersediaan bahan galian yang berlimpah, energi panas bumi untuk pembangkit listrik, dan keindahan panorama alam adalah contoh dampak positif dari keberadaan gunung api yang telah lama dimanfaatkan oleh masyarakat luas.

Ke depan, lanjut Junun, data sumber daya lahan 127 gunung api di Indonesia perlu dikumpulkan secara menyeluruh sehingga dapat diolah untuk menghasilkan klasifikasi gunung api baru yang berdasarkan pada tingkat sumber daya lahannya. "Sebagai pemilik gunung api terbanyak, kita bisa menjadi pelopor di dunia untuk menghasilkan klasifikasi baru gunung api menurut sumber daya lahan. Ide ini bagus sekali. Selama ini, klasifikasi gunung api cenderung berdasarkan frekuensi letusan dan identik dengan bencana", terangnya. **[Randhi Atiqi, 2018]**

Tim Survei Gunung Api



## PELATIHAN SDM PPIDS SELURUH INDONESIA UNTUK ASISTENSI PEMETAAN TATA RUANG

Penyelesaian Peta Rencana Tata Ruang mulai dari RTRW Provinsi hingga Rencana Detail Tata Ruang masih memerlukan berbagai strategi percepatan dan simplifikasi dalam penyelesaiannya. Hingga pertengahan tahun 2018 pencapaian rekomendasi di BIG masih belum maksimal yaitu 16 rekomendasi untuk RTRW Provinsi, 139 rekomendasi untuk RTRW Kabupaten/Kota, dan 177 rekomendasi untuk RDTR. Hal ini belum berbanding lurus dengan banyaknya RTR yang disusun dan pertemuan asistensinya.

Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial (PPIDS) yang tersebar hampir diseluruh wilayah Indonesia, menjadi salah satu harapan untuk dilakukannya percepatan penyelesaian peta rencana tata ruang melalui proses asistensi dan supervisi. Terkait hal itu, maka diberi pembekalan dan penyamaan standar pemeriksaan kepada SDM PPIDS.

Pada tanggal 30 Juli - 3 Agustus 2018 Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas (PPTRA) bekerja sama dengan Pusat Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial (PSKIG) melakukan pelatihan SDM untuk PPIDS se-Indonesia. Dari 20 PPIDS yang ada di Indonesia, hadir 19 PPIDS dan mengikuti acara dari awal hingga akhir. Acara ini dibuka secara resmi oleh Deputi Bidang IIG, Adi Rusmanto, yang dilanjutkan dengan materi dari Kapus PPTRA, Mulyanto Darmawan serta dari akademisi Planologi ITB, Petrus Natalivan.

Kegiatan ini dibagi menjadi dua sesi penting yaitu pembekalan dan simulasi. Pembekalan dilakukan pada hari pertama hingga ketiga. Selama tiga hari, dilakukan pemberian materi supervisi yang biasa dilakukan pada saat asistensi dan supervisi, mulai dari pemeriksaan sumber data hingga album peta. Pembekalan kali ini masih difokuskan untuk pemeriksaan peta RDTR. Tahun depan diharapkan dapat berlanjut untuk Peta RTRW. Pada hari ketiga dan keempat dilakukan simulasi terhadap 20 kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat dan Banten.

Kedepannya, PPIDS ini diharapkan dapat berperan aktif dalam membantu proses asistensi dan validasi Peta RTR dengan mekanisme atau regulasi yang diatur resmi oleh Badan Informasi Geospasial. **[Chintia Dewi, 2018]**

Peserta Pelatihan dari PPIDS

## PELATIHAN SISTEM DINAMIS UNTUK TINGKATKAN SDM PPTRA BIG

Peserta Pelatihan

PPTRA BIG bekerja sama dengan LPPM ITB menyelenggarakan Pelatihan Sistem Dinamis pada tanggal 13-16 Agustus 2018 di Kota Bandung. Pelatihan diikuti oleh staf PPTRA BIG dan Staf Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan (TRP) Kementerian PPN/Bappenas. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas sumberdaya manusia staf PPTRA dan TRP Bappenas sebagai mitra kerja BIG.

Pelatihan ini menghadirkan beberapa akademisi dan praktisi dalam model sistem dinamis. Nurohman Wijaya menyampaikan pengantar sistem informasi perencanaan dan pemodelan spasial. Ibnu Syabri memberikan pengantar analisis dan pemodelan spasial. Selain itu, peserta juga dikenalkan Geoda untuk melakukan analisis spasial statistik secara mudah dan sederhana.

Pada akhir kesempatan salah satu praktisi sistem dinamis, Teten Avianto memaparkan model sistem dinamis. Peserta dibekali dengan kemampuan *systems thinking* bagaimana cara pandang dan perspektif yang melandasi pemodelan sistem dinamis. Peserta diarahkan untuk memahami kedalaman berpikir, peristiwa, pola struktur sistem, mental model dan visi bersama. Salah satu kekhasan sistem dinamis dibandingkan dengan pendekatan lain dalam memahami sistem yang kompleks adalah *feedback loop* yang dinyatakan dalam konsep *stock* dan *flow*. Dengan *stock* dan *flow*, konsep *feedback* dalam suatu sistem akan lebih mudah dipahami dan disimulasikan. **[Roswidyatmoko Dwihatmojo, 2018]**

Resensi Buku

## NKRI DARI MASA KE MASA

"Konsep wilayah Negara Indonesia dan batas-batasnya adalah hasil perjuangan putra putri terbaik bangsa. Diawali dengan Deklarasi Djoeanda pada tanggal 13 Desember 1957. Konkretnya, para pendiri bangsa berusaha menerapkan asas negara kepulauan kepada dunia internasional. Wilayah kepulauan tersebut mencakup perairan kepulauan, perairan pedalaman, dan laut teritorial selebar 12 mil laut diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar pada saat air surut terendah." Konsep wilayah dan batas negara tersebut merupakan pengantar yang disampaikan editor dalam buku ini. Jenis karya ilmiah ini tergolong bunga rampai penelitian dan pengkajian informasi geospasial yang menyajikan dinamika wilayah NKRI dari awal kemerdekaan bangsa Indonesia sampai masa kini dan upaya untuk mengembangkan visi kedepan yang lebih baik.

Editor membagi bukunya menjadi 4 (empat) bagian, yaitu Bagian I Kajian Historis NKRI Dalam Perspektif Geospasial; Bagian II Aspek Teknis Pemetaan Batas Wilayah; Bagian III Batas Wilayah, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Daya Dukung Budaya; dan Bagian IV Harmonisasi Sosial dan Budaya Dalam Kerangka NKRI.

Pada bagian awal buku diulas mengenai dinamika persoalan batas wilayah laut dalam sejarah NKRI, yuridiksi perairan Indonesia dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia, kepastian hukum wilayah perbatasan NKRI sebagai basis dalam pertahanan dan pengamanan wilayah negara, serta urgensi perubahan peraturan perundang-undangan landas kontinen Indonesia. Pada bagian kedua dibahas mengenai peran Badan Informasi Geospasial dalam pemetaan batas wilayah dan aspek teknis pemetaan batas wilayah dalam upaya percepatan penyelesaian batas daerah.

Selanjutnya, bagian ketiga mengkaji daya dukung budaya terhadap kesinambungan sumberdaya alam, disparitas spasial refleksi kesenjangan cita-cita dan realita 67 tahun Indonesia merdeka, etnis maritim dan permasalahannya, marginalisasi etnik maritim studi kasus di Kepulauan Karimunjawa, dan komunitas Kampung Laut di Kabupaten Cilacap.

Kemudian pada bagian terakhir, editor menyajikan pembahasan tentang tanah untuk rakyat: strategi menjaga harmoni sosial dan keutuhan NKRI, diaspora dan urgensi pemetaan etnik maritim: sebuah perspektif historis, kelangsungan hidup dan teritori sumberdaya, serta kearifan pemanfaatan ruang tanpa batas: kasus Pulau Panggang dan Pulau Sapeken.

Selain itu editor juga melengkapi bukunya dengan sebuah epilog yang memperluas khasanah kajian perkembangan pemahaman wilayah NKRI dan tantangan ke depan.

**[Rochmad Budi Santoso, 2018]**

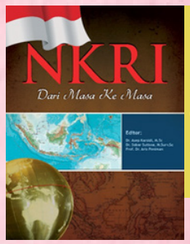


Judul Buku : NKRI DARI MASA KE MASA

Editor : Dr. Asep Karsidi, M.Sc., Dr. Sobar Sutisna, M.Surv.Sc., dan Prof. Dr. Aris Poniman.

Penerbit : SAINS PRESS, Bogor 2012